

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Proesi Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang dilaksanakan pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul kami dapat simpulkan:

a. Pelayanan Administrasi

Pada pelaksanaan pelayanan adminstrasi Seksi Pengujian Kendaraan Kabupaten Bantul telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaaraan Bermotor(SIM PKB) dan untuk pembayaran retribusi pengujian sudah terintegrasi dengan Bank BPD DIY;

b. Unsur Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pada pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Kabupaten Bantul masih ada beberapa alat uji yang tidak digunakan seperti speedometer dikarenakan. Yang berakibat pada pemastian persyaratan teknis dan laik jalan yang kurang maksimal sehingga kurang menjamin keselamatan kendaraan di jalan.

c. Unsur Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan perawatan dan perbaikan perlatan pengujian kendaraan bermotor Seksi Pengujian Kendaraan Kabupaten Bantul telah mengacu pada pasal 17 PM 133 tahun 2015

d. Unsur Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk kalibrasai peralatan pengujian kendaraan bermotor Seksi Pengujian Kendaraan Kabupaten Bantul telah dilakukan setiap

setahun sekali dibuktikan dengan stiker tanda kalibrasi pada gambar IV.6 –IV.9

e. Unsur SMK3/HSE pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk pelaksanaan SMK3/HSE pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul belum terdapat aturan yang dibuat khusus, selain itu ketersediaan APD masih belum lengkap

f. Unsur Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul masih belum memadainya peralatan uji, seperti Alat uji daya tembus cahaya pada kaca

V.2 Saran

Berdasarkan teori yang kami dapatkan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor, kami dapat menemukan dan menganalisis beberapa permasalahan dalam pelaksanaan PKP di Seksi PKB kabupaten Bantul, untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan PKB di Seksi PKB kabupaten Bantul, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

a. Pelayanan Administrasi

Seksi Pengujian Kendaraan Kabupaten Bantul telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB), tetapi terjadi antrian ketika menunggu bukti hasil lulus uji. Untuk itu segera diterapkan BLU-e agar mengurangi antrian dalam menunggu bukti hasil lulus uji.

b. Unsur Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Dioperasikannya semua alat uji utama agar menjamin keselamatan kendaraan di jalan secara maksimal

c. Unsur Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk perawatan dan perbaikan alat uji sudah mengacu pada pasal 17 PM 133 tahun 2015

d. Unsur Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk kalibrasi alat uji sudah dilakukan dengan baik, dimana dilakukan satu tahun sekali dibuktikan dengan stiker tanda kalibrasi pada gambar IV.6 –IV.9

e. Unsur SMK3/HSE pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Perlu dibuatkan peraturan mengenai SMK3/HSE dan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya K3 agar para penguji lebih tertib dalam penggunaan APD dan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Serta terkait adanya pandemic COVID-19 di tahun 2020, maka perlu adanya aturan tentang protocol kesehatan untuk mencegah dampak dari penyebaran virus tersebut dengan disediakanya *handsanitizer* di setiap tempat baik di gedung uji maupun di administrasi, dan fasilitas umum lainnya, mewajibkan setiap orang untuk menggunakan masker, membuat sekat atau jarak pada tempat duduk di ruang tunggu, serta melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala di gedung uji maupun gedung administrasi

f. Unsur Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Penambahan alat uji daya tembus cahaya pada kaca
2. Perbaikan atau pernggantian generator-set yang terbakar

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 1993. Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan. Jakarta
- _____. 2006 . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang. Jakarta
- _____. 2015 . Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- _____. 2012 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor. Jakarta
- _____. 2000 . Perda Kabupaten Bantul Nomor 57 tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Bantul
- _____. 2003 . Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/9/10/DRJD/2003 tentang Pelaksanaan Uji Berkala. Jakarta
- _____. 2007 . Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK 1471/AJ.402/DRJD/2007 Tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta
- _____. 2009 . Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- _____. 2009 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta